

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas pendidikan sebagai salah satu pilar perkembangan sumber daya manusia yang bermakna, sangat penting bagi pembangunan nasional. Bahkan dapat dikatakan masa depan bangsa bergantung pada keberadaan pendidikan yang berkualitas yang berlangsung dimasa kini. Pendidikan yang berkualitas hanya akan muncul dari sekolah yang berkualitas. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas sekolah merupakan titik sentral upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas demi terciptanya tenaga kerja yang berkualitas pula. Dengan kata lain upaya peningkatan kualitas sekolah adalah merupakan tindakan yang tidak pernah bergenti, kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 alenia IV ditegaskan bahwa tujuan didirikannya Kesatuan Republik Indonesia adalah:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.(UUD 1945:2).

Dalam upaya peningkatan kualitas sekolah, tenaga kependidikan yang meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, teknis sumber belajar sangat berperan sebagaimana mestinya dan

sebagai tenaga kependidikan yang berkualitas. Tenaga pendidik yang berkualitas adalah tenaga pendidik yang sanggup dan terampil dalam melaksanakan tugasnya guna untuk mencerdaskan peserta didik.

Usaha untuk mencerdaskan peserta didik juga tidak dapat dipisahkan dari bidang pendidikan dan Pemerintah menyadari bahwa untuk mencerdaskan bangsa tidak mungkin mengabaikan pendidikan. Pemerintah selalu berupaya mengadakan pembenahan terhadap sarana prasarana dan meningkatkan mutu pendidikan nasional, hal ini dilakukan untuk menciptakan proses pendidikan yang berkualitas dan berbudaya karena Indonesia memiliki sumber daya manusia yang beragam. Pendidikan yang dikembangkan di Indonesia harus bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 yang telah diamandemen menyatakan:

- 1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak
- 2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah pernah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umum manusia. (UUD 1945:2)

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa semua warga negara wajib mendapatkan

pendidikan yang layak dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang sudah direncanakan oleh pemerintah yaitu mensukseskan program wajib belajar. Bukan hanya pemerintah saja yang berusaha untuk mensukseskan program wajib belajar tersebut tetapi pihak masyarakat yang putra-putranya dikenai oleh pendidikan harus juga berusaha membantu pemerintah. Sebab kalau masyarakat berdiam diri, apalagi menentang program belajar ini, berarti menelantarkan atau meniadakan peluang untuk mendapatkan kesempatan belajar. Para pendidik, masyarakat dan pemerintah perlu bersikap dan bertindak positif demi mensukseskan program dengan maksud untuk mengikuti suatu perkembangan khususnya di dunia pendidikan.

Tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, paradigma pembelajaran di sekolah banyak mengalami perubahan, terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran dari yang bersifat *behaviouristik* menjadi *konstruktifistik*, dan berpusat pada guru (*teaching centered*) menuju berpusat pada siswa (*student centered*). Konstruktivisme mengajarkan bahwa belajar adalah membangun pemahaman atau pengetahuan yang dilakukan dengan cara mencocokkan fenomena, ide atau aktifitas yang baru dengan pengetahuan yang telah ada dan sudah pernah dipelajari. Konsekuensi dari konsep belajar seperti itu adalah siswa sungguh-sungguh membangun konsep pribadi dalam sudut pandang belajar bermakna dan bukan sekedar hafalan atau tiruan. Peranan guru tidak semata-mata hanya memberikan ceramah yang sifatnya *teksbook* kepada siswa, melainkan guru harus mampu membangun pengetahuan dalam pemikirannya. (Sartono, 2002:12).

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan maka akan dapat membantu manusia dalam mengembangkan diri sehingga mampu menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Jika diamati sejauh ini, keberhasilan dalam dunia pendidikan belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran yang terjadi sekarang makin bersifat satu arah, dimana hanya pihak pendidik atau guru yang aktif, sedangkan siswa hanya sebagai pendengar saja. Untuk itu diharapkan dari berbagai komponen yang ada dalam dunia pendidikan harus saling melengkapi, baik guru, siswa, kepala sekolah, keluarga maupun pemerintah harus bersama-sama menciptakan sebuah konsep pembelajaran yang tepat dan sesuai. (Sartono, 2002:12).

Dalam mengelola proses belajar mengajar di dunia pendidikan, diperlukan suatu keterampilan tertentu oleh guru untuk menyampaikan sesuatu materi pelajaran. Keterampilan guru sangat diperlukan karena setiap siswa memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda sehingga siswa dapat menguasai materi pelajaran sesuai target yang telah ditetapkan kurikulum. Penyampaian materi oleh guru supaya berhasil mencapai tujuannya perlu memperhatikan masalah yang paling penting disamping materi pelajaran yaitu penggunaan metode pembelajaran.

Saat ini metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah ada dan banyak dilaksanakan di SD selain pembelajaran dengan metode ceramah adalah diskusi.

Penggunaan metode diskusi kelompokpun belum mampu melibatkan setiap siswa ke dalam kegiatan pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan

menyenangkan. Hanya siswa tertentu yang terlihat dalam proses diskusi secara dialogis dan interaktif. Akibatnya, Pendidikan Kewarganegaraan belum mampu menjadi mata pelajaran yang disenangi siswa. Akibat dari kondisi pembelajaran semacam itu adalah kegagalan siswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbicara atau berdialog, serta sikap positif terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengusulkan model pembelajaran dengan menggunakan metode *Group Investigation (GI)*. Dengan menggunakan metode *Group Investigation (GI)* ini, para siswa diharapkan dapat saling belajar, bekerjasama, dan saling berkomunikasi secara lisan sehingga mampu memecahkan masalah.

Dengan menggunakan metode *Group Investigation (GI)* ini, siswa akan belajar lebih kooperatif dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya dan yang paling penting membina kemahiran untuk menjadi siswa yang belajar secara sendiri (Hamizefr, dkk:2003). Siswa akan membina kemampuan berfikir secara kritis secara kontinu berkaitan dengan ide yang dihasilkan serta yang akan dilakukan.

Dalam teori pembelajaran yang perlu dilakukan adalah merefleksi cara penyampaian materi pelajaran PKn serta metode pembelajaran yang digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Untuk dapat membangkitkan motivasi, dan semangat kebersamaan serta saling membantu dalam menguasai materi pelajaran PKn. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran *Group Investigation (GI)*.

Menurut Akhmad (2009;1) bahwa *Group Investigation (GI)* merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang telah tersedia, misalnya : buku-buku pelajaran, LKS, Artikel, majalah, atau melalui internet.

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD, khususnya dalam pembelajaran Kompetensi Dasar, jenis metode *Group Investigation (GI)* ini paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Metode ini diimplementasikan dengan menggunakan model diskusi kelompok untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan terhadap siswa secara individual untuk menumbuhkembangkan potensi dirinya.

Siswa akan belajar dan terus belajar jika kondisi pembelajaran dibuat menyenangkan, nyaman dan jauh dari perilaku yang menyakitkan perasaan siswa. Belajar melibatkan perasaan dan suasana belajar yang menyenangkan sangat diperlukan, karena siswa tidak akan bekerja optimal bila perasaan dalam keadaan tertekan. Perasaan senang biasanya akan muncul bila belajar diwujudkan dalam bentuk permainan dan penyampaian materi yang mudah dapat diterima oleh siswa. Siswa akan dapat menguasai materi pembelajaran dengan efektif jika kegiatan belajar mengajar memberikan kegiatan latihan sesuai kemampuan siswa dan siswa dapat berperan aktif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.

Faktor penunjang lainnya dalam Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah penerapan strategi metode dalam kegiatan belajar mengajar di kelas oleh guru yang memiliki kompetensi untuk memberi

bimbingan kepada anak didik. Guru dapat dikatakan menggunakan inovasi apabila ia telah mengatur ruang kelas dan pelengkap yang sudah ada dengan desain baru yang dipandang dapat lebih membantu tercapainya suatu tujuan pengajaran dan meningkatkan pemahaman dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Melihat kenyataan bahwa tingkat pemahaman pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD Negeri 1 Demangan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2013/2014 masih jauh dari keberhasilan pembelajaran yang ada, karena:

1. Siswa kurang dapat memahami mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
2. Siswa kurang berani bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dikuasai
3. Pengalaman belajar siswa yang terkait materi masih sangat kurang
4. Siswa kurang merespon dan kurang motivasi dari lingkungan belajar, terutama pengalaman sebagai sumber belajar.
5. Pemilihan metode pembelajaran yang kurang tepat yang menyebabkan siswa bosan untuk mengikuti pembelajaran.

Dari uraian di atas dan realita yang terjadi di SD Negeri 1 Demangan Ponorogo, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Upaya Peningkatan Pemahaman Siswa Pada Materi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Melalui Penerapan Metode *Group Investigation (GI)* Pada Mata Pelajaran Pkn Kelas V SD Negeri 1 Demangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan metode *Group Investigation (GI)* dalam mata pelajaran PKn pada Materi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) siswa kelas V SD Negeri 1 Demangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014?
2. Apakah metode *Group Investigation (GI)* dapat meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran PKn Materi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kelas V SD Negeri 1 Demangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014?

C. Hipotesis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:64). Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti, sehingga terbukti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan kerangka berfikir yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut ::

1. Penerapan metode *Group Investigation (GI)* pada siswa mata pelajaran PKn Materi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) siswa kelas V SD Negeri 1 Demangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014 terdapat kesulitan .

2. Pembelajaran dengan metode *Group Investigation (GI)* dapat meningkatkan pemahaman siswa saat mengikuti mata pelajaran PKn pada Materi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kelas V SD Negeri 1 Demangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan metode *Group Investigation (GI)* dalam mata pelajaran PKn pada Materi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) siswa kelas V SD Negeri 1 Demangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Untuk mengetahui metode *Group Investigation (GI)* dapat meningkatkan pemahaman siswa saat mengikuti mata pelajaran PKn pada Materi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kelas V SD Negeri 1 Demangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan maksudnya untuk menambah pengetahuan serta wawasan yang lebih luas, agar pendidikan bisa berhasil dan sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk lembaga, guru, siswa, peneliti dan masyarakat.

a. Bagi Pendidik

Memperbaiki proses belajar mengajar dalam pembelajaran PKn di kelas dan Memberikan alternative kegiatan pembelajaran PKn.

b. Bagi siswa

Menciptakan rasa senang belajar Pendidikan Kewarganegaraan selama pelajaran berlangsung dengan adanya group investigation

c. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pembelajaran dengan group investigation yang dapat dijadikan bekal dan alternatif pembelajaran dan praktik pembelajaran sesungguhnya.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode *Group Investigation* adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Metode pembelajaran ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses kelompok
2. Batasan penelitian dalam hal ini hanya mencakup tentang pemahaman siswa dalam mata pelajaran PKn pada Materi Keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI, khususnya kelas V SDN 1 Demangan Ponorogo.

G. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah tentang judul yang akan diteliti yaitu :

1. Peningkatan Pemahaman

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2001:1998), peningkatan berasal dari kata tingkat yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Tingkat artinya tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan peradaban, dan sebagainya) pangkat, derajat, taraf, kelas. Sedangkan peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Selain itu peningkatan sama artinya dengan kenaikan (Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, 1996:680).

Sedangkan pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami, jadi peningkatan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan dalam meningkatkan pemahaman atau memahami sesuatu.

2. Pemahaman Belajar

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami (Em Zul, Fajri, 2008 : 607-608)

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. Hasil belajar *pemahaman* merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan (Nana Sudjana, 1992: 24) menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu : (1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, (2) tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok dan (3) tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi. Setelah dilakukan analisa awal bahwa SDN 1 Demangan Ponorogo memiliki kriteria pemahaman tingkat kedua.

3. *Group Investigation*

Group Investigation adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Metode pembelajaran ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses kelompok (*group process skills*).

4. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan terpaan moral yang mencari

jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala sosial, khususnya yang berkaitan dengan moral serta perilaku manusia.

Dalam standart isi 2006 dijelaskan bahwa PKn persekolahan atau mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang mampu memahami dan mampu melaksanakan dan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.